

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Dalam Agoes (2012:100) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

a) Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

b) Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap

lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.”

Menurut Mulyadi (2014:163) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan laporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Arens (2011:137) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a) Keandalan pelaporan keuangan Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
- b) Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (2011 : 67) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran – pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, menendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) dalam Boyton dan Johnson (2010:373) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

Pengendalian Internal (*Internal Control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektifitas dan efisiensi operasi

Laporan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) juga menekankan bahwa konsep fundamental (*fundamental concepts*) dinyatakan dalam definisi berikut :

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.
2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.
4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Berdasarkan definisi di atas maka pengendalian internal merupakan upaya yang dilakukan setiap orang dalam berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen dan personil lainnya untuk menjaga kekayaan organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja untuk mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data.

2.2 Tujuan Penerapan Pengendalian Internal

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:127) tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

- 1) Strategis, sasaran-sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
- 2) Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
- 3) Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2014:163) yang meliputi tujuan pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Johnson (2010 : 394) pengendalian internal untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga kategori tujuan : (1) keandalan dari informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi dari operasi. Karena tidak semua jurusan tersebut dan pengendalian yang berhubungan relevan dengan suatu audit laporan keuangan, satu dari tiga pertama auditor untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, kedua adalah mengidentifikasi tujuan tersebut dan pengendalian yang relevan. Secara umum, hal

ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kategori pertama keandalan dari pelaporan keuangan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian penting adalah pengendalian yang dimaksudkan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk pemakai eksternal telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sedangkan menurut Arens (2011:292) ada tujuh macam tujuan struktur pengendalian internal secara terinci yang harus terpenuhi untuk mencegah setiap kesalahan di dalam jurnal dan catatan. Struktur Pengendalian Internal harus mencukupi untuk memberikan kepastian yang meyakinkan bahwa :

1. Setiap transaksi yang dicatat adalah sah (validitas). Struktur pengendalian internal harus mencukupi untuk memberikan transaksi-transaksi fiktif dan yang sebenarnya tidak terjadi di dalam jurnal atau catatan akuntansi lainnya.
2. Setiap transaksi diotorisasi dengan tepat (otorisasi). Kalau transaksi yang tidak diotorisasi terjadi, hal ini dapat mengakibatkan adanya transaksi yang curang, dan juga dapat mengakibatkan pemborosan atau pengrusakan terhadap aktiva perusahaan.
3. Setiap transaksi yang terjadi dicatat (kelengkapan). Setiap prosedur yang dimiliki klien harus memberikan pengendalian untuk mencegah penghilangan setiap transaksi dari catatan.
4. Setiap transaksi dinilai dengan tepat (penilaian). Struktur Pengendalian Internal yang memadai selalu disertai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan pencatatan setiap transaksi pada berbagai langkah proses pencatatan.

5. Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi). Klasifikasi perkiraan yang tepat, sesuai dengan bagan perkiraan klien, harus ditetapkan di dalam jurnal kalau laporan keuangan hendak dinyatakan dengan tepat. Klasifikasi ini juga mencakup berbagai kategori seperti divisi dan hasil produk.
6. Setiap transaksi dicatat pada waktu yang tepat (ketepatan waktu). Pencatatan setiap transaksi baik sebelum atau setelah saat terjadinya, selalu menimbulkan kemungkinan adanya kelalaian untuk mencatatnya atau dicatat dengan jumlah yang tidak benar. Jika keterlambatan pencatatan terjadi pada akhir periode maka laporan keuangan akan mengandung kesalahan.
7. Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan ikhtisar). Dalam beberapa keadaan, masing-masing transaksi diikhtisarkan (dirangkum menjadi satu) dan dijumlahkan sebelum dicatat ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian jurnal tersebut diposting (dibukukkan) ke dalam buku besar, dan buku besar tersebut diikhtisarkan lagi dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selain metode yang digunakan untuk memasukkan setiap transaksi ke dalam catatan tambahan dan untuk mengikhtisarkan setiap transaksi, pengendalian yang memadai selalu dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengikhtisaran tersebut adalah benar.

2.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dalam SAS (*Statement on Auditing Standards*) No.78 yang terdapat dalam Standar Profesi Akuntansi Publik menyatakan bahwa “komponen pengendalian internal terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Invironment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Selanjutnya, COSO menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:

- a. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
- b. Dewan direksi menunjukkan indenpendensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
- c. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.
- d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan.

- e. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko sebagai berikut:

- a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa

arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO menegaskan mengenai prinsip prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima.
- b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain

pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu.

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal *Commitee of Sponsoring Organization of he Treadway Commission (COSO)* (2013:4) yaitu:

- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan (terus menerus), dibangun kedalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam

lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, 2013).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

2.4 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Ada 4 unsur pokok sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2014), yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
 - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
 - b) Pemeriksaan mendadak
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi
 - d) Perputaran jabatan
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
 - f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
 - g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta

berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

2.5 Pengelolaan

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengolahan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Manajemen dalam organisasi pada dasarnya di maksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar : Planning, organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan.

2.6 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (Ikatan Akuntansi Indonesia).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, organisasi nirlaba dapat menerima sumber daya lain dari hasil pendapatan atas jasa yang diberikan pada publik dan atau investasi yang dilakukan.

2.7 Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba adalah:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

2.8 Pendapatan Organisasi Nirlaba

Suatu organisasi nirlaba berkerja untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk tujuan sosial yang bersifat tidak komersil, tidak ada unsur mencari laba (moneter) dalam menarik perhatian publik.

Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa suatu organisasi nirlaba sudah memiliki sumber dana untuk digunakan membiayai kegiatannya. Perlu diingat, organisasi nirlaba dapat memiliki satu atau lebih pendapatan dan begitu juga sebaliknya. Banyak organisasi nirlaba hanya memperoleh satu jenis pendapatan saja, yaitu hibah dari organisasi nirlaba donatur. Hal ini beresiko terjadinya kelumpuhan organisasi apabila hibah kegiatan telah selesai digunakan. Oleh karena itu, sumber

pendapatan lain organisasi nirlaba dilakukan untuk mendukung keberlangsungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Jenis-jenis pendapatan yang dapat digunakan oleh suatu organisasi nirlaba, yaitu:

1. Pendapatan dari kegiatan program

Suatu organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi dengan memperhatikan beberapa hal dasar, seperti:

- a. Pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi nirlaba; Hal ini dikarenakan dukungan dana dari para donatur tidak dapat diharapkan terusmenerus. Oleh karena itu, organisasi harus dapat mandiri dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelayanan melakukan penyediaan sarana air bersih. Dana donatur digunakan untuk membangun prasarana, sedangkan sumbangan masyarakat digunakan untuk biaya perawatan/operasional melalui penerapan tarif yang telah disepakati. Hal ini merupakan upaya untuk mempertahankan kesinambungan pelayanan.

- b. Perluasan pelayanan masyarakat

Dalam upaya memberikan kontribusi melalui kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi nirlaba, diharapkan dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan yang dilakukan dapat menjangkau lebih banyak cakupan masyarakat sesuai dengan sasaran kegiatan.

- c. Penghargaan atas kinerja yang dilakukan organisasi nirlaba.

Jenis kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengenaan tarif justru membuat masyarakat lebih menghargainya. Sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar partisipasi dalam membangun prasarana tersebut namun memberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan dari pengenaan tarif yang diberlakukan tersebut.

2. Pendapatan dari donasi/sumbangan (*fundraising*)

Donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa/ produk yang diperjual belikan. Namun, minat masyarakat terutama Indonesia masih relatif kecil untuk mendukung kegiatan organisasi. Dugaan ini muncul karena beberapa alasan, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi nirlaba. Donasi yang diberikan kebanyakan bersifat keagamaan atau bencana alam dan kurang mendukung untuk jenis kegiatan yang bersifat jangka panjang.

3. Pendapatan dari hibah (*grant*)

Mirip seperti donasi, hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Seperti pembuatan proposal, rincian kegiatan, dan rincian dana yang dibutuhkan. Sehingga dana hibah murni sebagai donor bukan pelaksana suatu kegiatan karena diberikan sesuai proposal yang diajukan. Biasanya jumlah dana yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan jenis donasi/sumbangan.

4. Pendapatan dari bunga dan hasil investasi lainnya.

Pendapatan ini dikenal sebagai capital income, yaitu pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasinya. Kenyataannya, tidak semua organisasi mempunyai kekayaan yang cukup untuk diinvestasikan, dan tidak semua investasi cocok dengan karakteristik organisasi nirlaba. Pada umumnya, organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan resiko tinggi karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlahnya. Sehingga organisasi nirlaba harus lebih berhati-hati/ konservatif dalam memperhitungkan resiko dan keuntungan dalam berinvestasi.

5. Pendapatan dari iuran anggota

Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba dengan beberapa anggota biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran. Besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Kesulitan dari pendapatan berbasis iuran anggota ini adalah pada anggotanya sendiri, iuran yang bersifat individual sulit dikumpulkan apabila sifatnya individual dibandingkan dengan keanggotaan yang bersifat profesi atau badan. Kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan pendapatan dari iuran anggota relatif sedikit dan umumnya berkaitan dengan jenis-jenis keanggotaan serta besaran iuran yang perlu ditetapkan. Disamping itu, perlu ditetapkannya mengenai mekanisme untuk mengikat anggota lewat komunikasi antara organisasi nirlaba dan anggota. Tujuannya adalah agar loyalitas anggota terbentuk dan kontinuitas pendapatan dapat lebih tinggi.

6. Pendapatan dari usaha komersil

Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menanganai atau memiliki saham/kepemilikan badan usaha komersil. Beberapa hal dapat diterapkan dalam usaha untuk mendapatkan pendapatan melalui usaha komersil yaitu:

- a. Organisasi nirlaba terlibat langsung dalam kegiatan komersil baik dalam penyediaan modal hingga pengelolaan
- b. Organisasi tidak terlibat langsung dalam kegiatan komersil. Organisasi nirlaba menjadi investor dan pengelolaan usaha komersil dilakukan oleh pihak lain.

Jenis usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi nirlaba dapat disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan organisasi. Diharapkan dengan membuka suatu peluang pendapatan dari usaha komersil ini, upaya untuk pelebaran pendapatan organisasi nirlaba dari segi keuangan dapat menyokong besaran dana yang ditargetkan sekaligus mendukung kegiatan organisasi. Penting untuk diketahui adalah pemisahan pengelolaan unit komersial dengan program organisasi nirlaba. Pemisahan secara tegas dapat dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung-jawab. Sehingga kegiatan komersial dapat berjalan tanpa keterlibatan dari organisasi nirlaba dalam operasional harian. Pemisahan ini penting dilakukan untuk menghindarkan kerancuan tentang penggunaan sumber daya organisasi nirlaba. Permasalahan dari pengelolaan sumber dana yang diperoleh dari usaha komersial adalah permodalan serta pengelolaan usaha. Permodalan terkait dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha komersial. Kerapkali penyisihan sebagian dari surplus program tidak dapat

dilakukan karena surplus tidak senantiasa terjadi dan bila ada kemungkinan jumlahnya tidak signifikan.

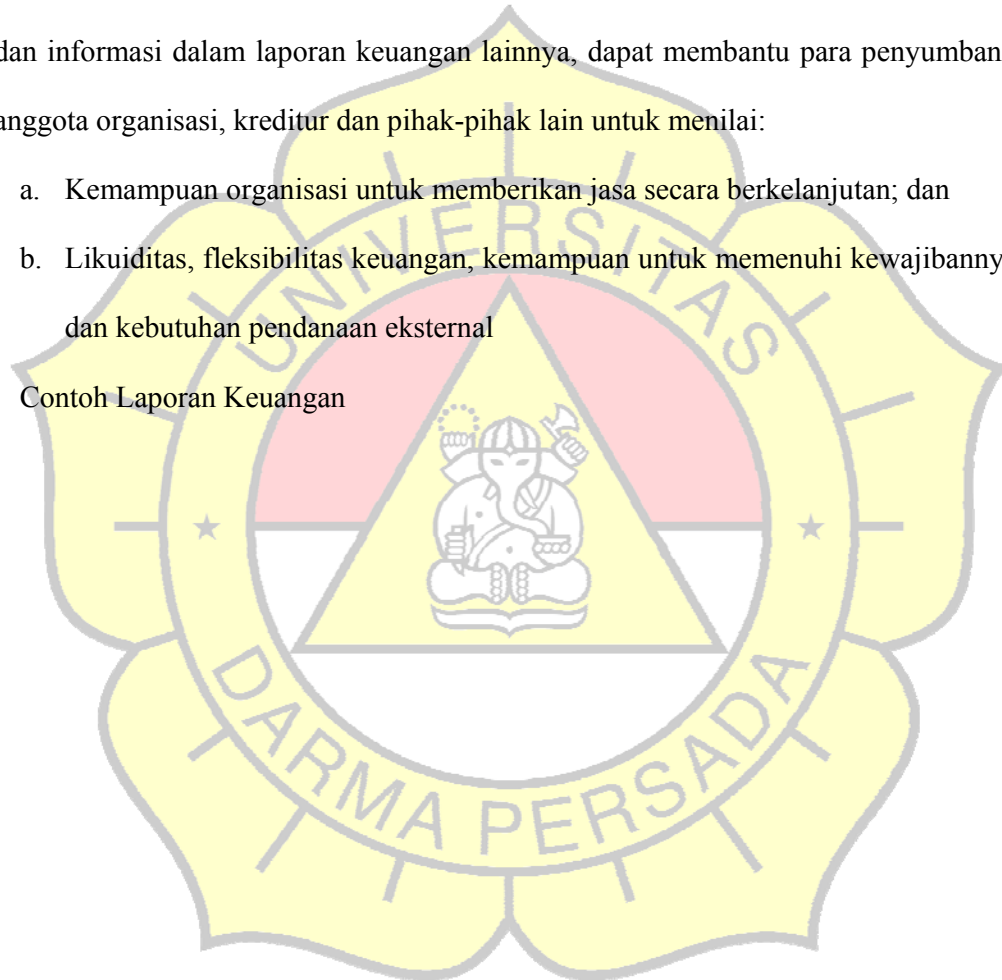
2.9 Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1. Laporan Posisi Keuangan

Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal

Contoh Laporan Keuangan



Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA		
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang bunga	xxx	xxx
Persediaan dan biaya dibayar di muka	xxx	xxx
Piutang lain-lain	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti Investasi	xxx	xxx
Aset Tetap	xxx	xxx
Investasi jangka panjang	xxx	xxx
<i>Jumlah aset</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas jangka pendek</i>		
Utang dagang		
Pendapatan diterima dimuka yang		
Dikembalikan	-	xxx
Utang lain-lain	xxx	xxx
Utang wesel	-	xxx
<i>Liabilitas jangka panjang</i>		
Kewajiban tahunan	xxx	xxx
Utang Jangka Panjang	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah liabilitas</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASET NETO		
Tidak Terikat	xxx	xxx
Terikat temporer	xxx	xxx
Terikat permanen	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah aset neto</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	<u>xxxxx</u>	<u>xxxxx</u>

Sumber dari Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia, data diolah kembali

2. Laporan Aktivitas

Di dalam PSAK No. 45 (2016) disebutkan bahwa tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- b. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi kreditur dan pihak lainnya untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode.
- b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa.
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Contoh Laporan Aktivitas

Tabel 2.2 Laporan Aktivitas:

ENTITAS NIRLABA				
Laporan aktivitas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2				
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
PENDAPATAN				
Sumbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jasa Layanan	xxx	-	-	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Penghasilan investasi lain	xxx	-	-	xxx
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	-	-	-
ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATAANNYA				
Pemenuhan program pembatasan	xxx	(xxx)	-	-
Pemenuhan pembatasan	xxx	(xxx)	-	-
Perolehan peralatan	xxx	(xxx)	-	-
Berakhirnya pembatasan waktu	xxx	(xxx)	-	-
Jumlah pendapatan	xxxxx	(xxxxx)	xxxxx	xxxxx
BEBAN				
Program A	xxx	-	-	xxx
Program B	xxx	-	-	xxx
Program C	xxx	-	-	xxx
Manajemen dan umum	xxx	-	-	xxx
Pencarian dana	xxx	-	-	xxx
Jumlah beban	xxx	-	-	xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx	-	-	xxx
kerugian akrual dan kewajiban tahunan	-	xx	-	xx
Jumlah beban	xxxxx	xx	-	xxxxx
PERUBAHAN ASET NETO	xxxxx	(xxxx)	xxxxx	xxxxx
ASET NETO AWAL TAHUN	xxxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx
ASET NETO AKHIR TAHUN	xxxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx

Sumber dari Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia data diolah kembali

3. Laporan Arus Kas

Di dalam PSAK No. 45 (2016) disebutkan bahwa tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2 tentang laporan arus kas. Tetapi terdapat tambahan yang disajikan oleh organisasi nirlaba dalam laporan arus kasnya seperti yang tertera dalam PSAK No. 45, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi
 - a. Hasil surplus atau defisit lembaga.
 - b. Biaya depresiasi atau biaya amortisasi yang dibebankan dalam periode yang bersangkutan karena biaya ini dianggap sebagai biaya non kas sehingga perlu dikoreksi karena menambah biaya namun tidak mengurangi saldo kas.
 - c. Perubahan pada perkiraan tagihan/piutang, bila terjadi pelunasan tagihan dengan pembayaran sehingga dianggap terjadi uang kas masuk sebesar pelunasan tersebut.
 - d. Persediaan: penurunan saldo persediaan dianggap sebagai terjadinya penjualan hingga mengakibatkan arus kas masuk. Begitu pula sebaliknya jika terdapat kenaikan saldo berarti terjadi pembelian persediaan yang menggunakan uang kas sehingga menambah arus kas keluar.

e. Utang jangka pendek: bila terjadi pelunasan utang yang ditunjukkan dengan adanya pengurangan saldo utang dari awal tahun yang lebih besar dari akhir tahun yang lebih besar dari akhir tahun maka terjadi pengeluaran kas. Begitu pula sebaliknya saat saldo utang di akhir tahun bertambah dari saldo utang di awal tahun berarti terjadi arus kas masuk.

f. Perkiraan lainnya seperti biaya dibayar dimuka dan lainnya.

2. Aktivitas Investasi

Termasuk dalam kelompok investasi adalah semua transaksi yang terkait dengan investasi lembaga berupa pembelian aktiva tetap atau aktiva lainnya. Dengan demikian perkiraan yang terlibat adalah perkiraan aktiva tetap dan aktiva lain.

3. Aktivitas Pendanaan

- a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
- b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
- c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- d. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Contoh Laporan Arus Kas

Tabel 2.3 Laporan Arus Kas :

ENTITAS NIRLABA	
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2	
AKTIVITAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Perubahan dalam aset neto	xxxxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	xxxxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	xx
kenaikan piutang bunga	(xxxx)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	xxx
kenaikan dalam piutang lain-lain	(xxxx)
kenaikan dalam utang dagang	xxxxx
penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(xxxx)
Penurunan dalam utang lain-lain	(xxxx)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(xxx)
Bunga dan dividen untuk investasi jangka panjang	(xxxx)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	(xxxxx)
kas neto diterima untuk aktivitas investasi	(xx)
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxx
pembelian peralatan	(xxxx)
penerimaan dari penjualan investasi	xxxxx
pembelian investasi	(xxxxx)
kas neto diterima untuk aktivitas investasi	(xxx)
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari sumbangan terikat dari:	
Investasi dalam endowment	xxx
Investasi dalam endowment berjangka	xxx
investasi dalam bangunan	xxxxx
investasiperjanjian tahunan	xxx
Aktivitas pendanaan lain	
Bunga dan deviden terikat untuk reinvestasi	xxx
pembayaran kewajiban tahunan	(xxxx)
pembayaran utang wesel	(xxxx)

Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)
	(xxxxx)
kas neto diterima untuk aktivitas investasi	(xxx)
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	(xxx)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	(xxx)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	xxx
Data tambahanAktivitas investasi dan pendanaan nonkas: peralatan yang diterima sebagai hibah	xxxx
pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan bunga yang dibayarkan	xxxx xxxx

Sumber dari Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia, data diolah kembali

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan yang dilampirkan bersamasama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Dalam catatan ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai angka-angka tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), catatan atas laporan keuangan terdiri dari:

a. Catatan A

Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan catatan B, dan C wajib disajikan. Organisasi menguraikan penyajian hibah atau wakaf berupa kas atau setara kas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak donatur.

b. Catatan B

Catatan B mengungkapkan penyajian aset bersih terikat temporer untuk periode keuangan tertentu seperti peralatan atau bangunan.

c. Catatan C

Catatan C mengungkapkan penyajian aset bersih terikat permanen yang dibatasi untuk kegiatan program.

d. Catatan D

Catatan D mengungkapkan penyajian aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan penyumbang melalui terjadinya beban tertentu atau terjadinya kondisi yang diisyaratkan oleh penyumbang.

e. Catatan E

Catatan E mengungkapkan penyajian investasi dicatat sebesar nilai pasar dan penghasilan (atau kerugian) yang telah terealisasi atau belum terealisasi dapat dilihat dari laporan aktivitas.

f. Catatan F

Catatan F mengungkapkan penyajian seluruh beban yang terjadi seperti gaji dan upah, biaya lain-lain, biaya perjalanan, depresiasi dan bunga.

Catatan atas laporan keuangan sangat berguna karena penjelasan maupun uraian tambahan tidak dapat dicantumkan secara langsung pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, maupun Laporan Arus Kas, mencakup pengungkapan tentang resiko dan kewajiban yang tidak dapat dicantumkan dalam bagian laporan keuangan yang lain.

Informasi yang terkandung dalam catatan atas laporan keuangan yaitu:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan disajikan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.

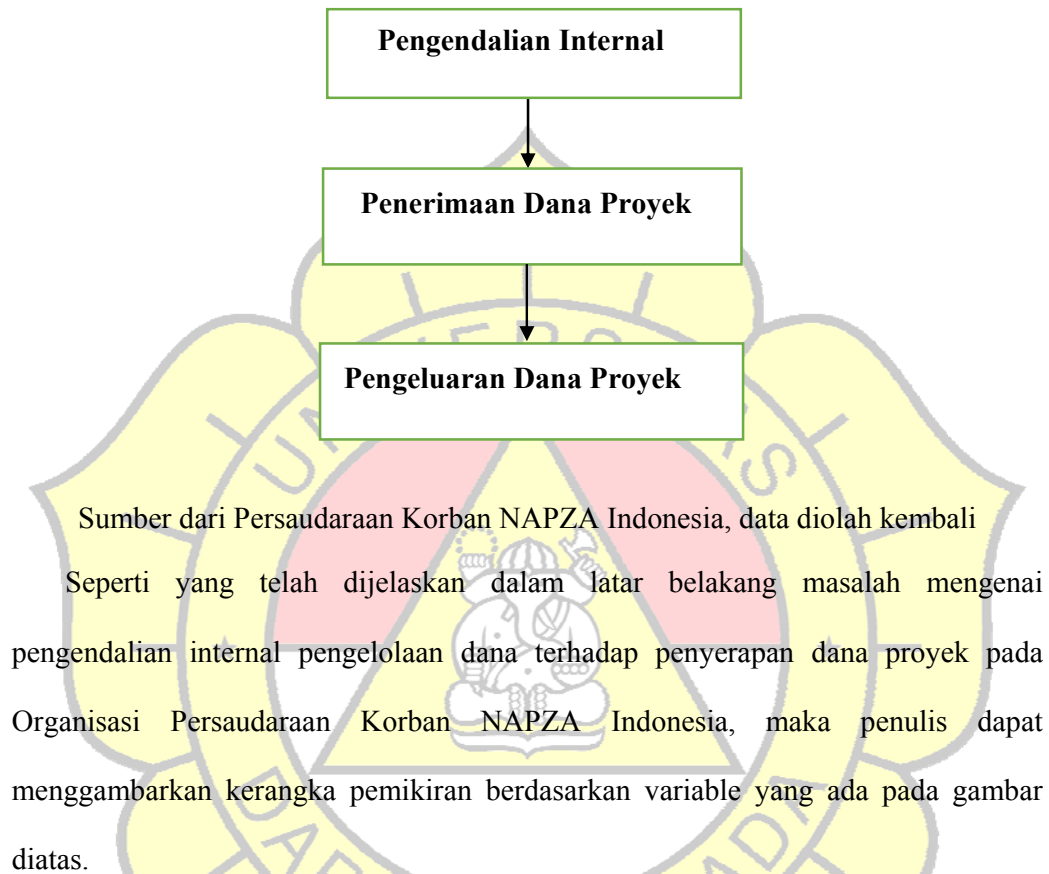
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
3. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Seringkali adanya perbedaan antara anggaran dengan realisasi menyebabkan penumpukann sisa dana aktivitas program, tidak terlaksananya salah satu aktivitas proyek di lapangan hal ini dapat berdampak ketika akan mengajukan proposal permintaan budget kepada pemberi dana mereka akan mengurangi nominal dengan beranggapan kinerja staf kurang baik atau dana yang diminta terlalu besar dari penggunaan sebenarnya. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang dalam

membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan permintaan donor yang akan disesuaikan kepada petugas lapangan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Harry Jonggur Tua Sinaga 2014	Evaluasi Efektifitas Pengendalian Internal Siklus Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berdasarkan COSO Internal Control Framework 2013 (Studi Kasus PT Imanuel Agape Tahun 2014)	Lima komponen indikator efektifitas yang menjadi acuan evaluasi adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
2	Abraham Ayom Ayom 2013	<i>Internal Controls And Performance In Non-Governmental Organizations: A Case Study Of Management Sciences For Health South Sudan.</i>	Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencegah inisiatif peraturan yang merugikan, seperti denda atau litigasi. Prinsip-prinsip akuntansi dan aturan audit internal mengharuskan organisasi atau perusahaan menetapkan pengendalian internal yang memadai dan fungsional untuk meningkatkan proses tata kelola perusahaan.
3	Dumitrascu Mihaela, Savulescu Lulian 2012	<i>Internal Control and the Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies</i>	Sistem pengendalian internal memainkan peran kunci dalam rantai jaminan terhadap keuangan akuntabilitas. Sebuah pengendalian internal yang efektif mengarah ke penyajian yang adil dari laporan keuangan dengan

			demikian meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam laporan keuangan.
4	Andriana, Sri Mangesti Rahayu dan Achmad Husaini 2015	Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan Jawa Timur)	Unsur-unsur pengendalian internal diantaranya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan, dan praktik yang sehat.
5	CPA Australia 2011	<i>Internal Controls For Not-For-Profit Organisations</i>	Pengendalian internal adalah sistem kebijakan dan prosedur yang melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan andal, mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mencapai operasi yang efektif dan efisien. Sistem-sistem ini tidak hanya berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan tetapi juga mencakup proses komunikasi baik secara internal maupun eksternal, manajemen staf dan penanganan kesalahan.
6	Petrascu Daniela, Tamas Attila 2013	<i>Internal Audit versus Internal Control and Coaching</i>	Audit internal adalah alat bantuan manajemen, yang memungkinkan pengambil keputusan dalam suatu entitas untuk mengelola pengelolaannya secara lebih baik kegiatan itu menilai semua resolusi manajemen dimaksudkan untuk memastikan operasi normal dan efisien, dan bukan yang terakhir menciptakan nilai tambah.

7	Eko Suryono, Eko Hariyanto 2012	<i>Relationship Between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment With Good Governance: Indonesian Case</i>	Audit internal adalah suatu organisasi yang berfungsi dengan tugas untuk menilai dan mengevaluasi semua kegiatan dalam organisasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan relatif individu untuk mengidentifikasi dirinya ke dalam organisasi.
8	Angelia N.M.Tinungki., R.J.Pusung 2014	Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana	Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga.
9	Kristina Dewanti 2016	Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Pada PNPM Generasi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk	Pemerintah merupakan salah satu sumber pendanaan yang paling penting untuk organisasi nirlaba. Sehingga diperlukan pengendalian internal dalam melakukan pengelolaan dananya. Pengendalian internal merupakan suatu teknik pengawasan dari seluruh kegiatan operasional organisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan.
10	Catherine Shakespeare Petrovits and Aimee Shih 2011	<i>The Causes And Consequences Of Internal Control Problem In Nonprofit Organizations</i>	Pengendalian internal yang lemah atas laporan keuangan berhubungan negative dengan donor berikutnya yang diterima setelah mengendalikan tingkat dukungan donor saat ini dan

			faktor-faktor lain yang mempengaruhi sumbangan.
11	Erapu Peter De Pietropapa 2011	<i>Internal Control Systems And Cash Management Policies In Non Governmental Organisations A Case Study Of Institute For International Cooperation And Development (C&D)</i>	Mekanisme pengendalian internal yang efektif dimaksudkan untuk menjadi ukuran risiko untuk mencegah organisasi dari potensi kerugian.
12	Mu'azu Saidu Badara, Siti Zabedah Saidin 2013	<i>Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level</i>	Sistem pengendalian internal yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi.

